

RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur dipanjatkan kehadiran Allah Awt atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga dapat diselesaikannya Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan Tahun 2022. Renja ini merupakan salah satu dokumen perencanaan yang harus dibuat oleh setiap SKPD sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Rencana Kerja Dinas Perhubungan merupakan bagian dari tahapan upaya pencapaian rencana kerja yang tertuang dalam Renstra Dinas Perhubungan yang dijabarkan kedalam program dan kegiatan tahun 2022, dan dengan tersusunnya Renja ini diharapkan akan dapat memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan memudahkan dalam melakukan evaluasi kinerja SKPD.

Demikian Rencana Kerja ini kami susun semoga bermanfaat dan dapat dilaksanakan sebagai pedoman dalam penyusunan RKA TA. 2022.

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Balangan



RUDIANSYAH SOFYAN, S.Hut, ME

Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19690324 199703 1 001

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB II. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	16
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	19
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	23
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	30
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Dan Sinergitas Kebijakan Daerah	38
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	46
3.3. Program dan Kegiatan	50
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Dishub Tahun 2022	56
BAB V. PENUTUP	62
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RENJA SKPD) untuk periode satu tahun. Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan Tahun 2022 disusun mengacu pada Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan untuk periode tahun 2022. Perumusan program, kegiatan, Sub Kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja Dinas Perhubungan tahun 2022 dirumuskan dengan menelaah hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2021 dan mengacu kepada rencana program prioritas pada rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Balangan Tahun 2022.

Selanjutnya Renja SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan Tahun 2022 sebagai tahapan penyusunan rancangan APBD Kabupaten Balangan Tahun 2022.

1.2. LANDASAN HUKUM

Peraturan perundang-undangan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan nomor 18);
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Prov. Kalsel;
10. Peraturan Gubernur Nomor 72 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tatakerja Perangkat Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2020-2024;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan Tahun 2022 adalah untuk merumuskan rencana kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Dinas Perhubungan sehingga diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu dan akuntabel dengan cara mengintegrasikan antara kemampuan dari potensi sumber daya manusia dengan sumber daya lainnya.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan Tahun 2022 adalah sebagai pedoman :

- 1) Pelaksanaan pelayanan Dinas Perhubungan
- 2) Pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan
- 3) Penyusunan rencana anggaran Dinas Perhubungan Tahun 2022.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan Tahun 2021 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan secara garis besar, sistematika isi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja–SKPD) Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, Review terhadap Rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Dishub Tahun 2019

BAB V. PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan Tahun 2021 yang didasarkan pada Renstra Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2016 – 2021 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan Tahun 2016 - 2021, untuk mengetahui :

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Perhubungan; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Dalam rangka memenuhi target sasaran RPJMD arah kebijakan yang dilaksanakan adalah peningkatan kualitas data dan informasi serta memantapkan sinkronisasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah melalui program pengembangan data informasi/statistik daerah dan program perencanaan dan pengendalian pembangunan yang berkualitas. Adanya data/informasi, menjadikan perencanaan yang dibuat menjadi terukur. Untuk mewujudkan peningkatan kinerja pembangunan daerah dilaksanakan program perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah. Dengan perencanaan yang baik yang senantiasa dipantau dan dikendalikan pelaksanaannya, diharapkan apa yang telah direncanakan dapat diwujudkan, dan target-target yang ditetapkan dapat terpenuhi.

Jika dibandingkan tahun 2020 dengan tahun 2021, jumlah program mengalami banyak perubahan, hal ini dikarenakan adanya perubahan nomenklatur dari Permendagri No 13 Tahun 2006 ke Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur dari program hingga sub kegiatan. Pada tahun 2020

jumlah program sebanyak 10 (Sepuluh) program sedangkan pada tahun 2021 hanya terdiri dari 2 (dua) program. Sedangkan untuk jumlah kegiatan, pada tahun 2020 ada 43 kegiatan, sedangkan di tahun 2021 berkurang menjadi 14 kegiatan. Dan pada tahun 2021 dengan adanya nomenklatur baru karena diatur sampai sub kegiatan, pada tahun 2021 terdapat 32 Sub Kegiatan.

Dari sisi penyerapan anggaran, serapan anggaran belanja langsung pada tahun 2020 sangat baik, yaitu sebesar Rp. 7.722.033.176,00 atau sebesar 94,74% dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan sebesar Rp. 8.150.487.100,00.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2019 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan disajikan pada table berikut :

Tabel 2.1
Realisasi Keuangan Program Kegiatan Dinas Perhubungan Kab. Balangan Berdasarkan Anggaran Belanja Langsung Tahun 2020

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU DANA	REALISASI		
			KEUANGAN	%	FISIK
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.113.241.100	1.021.205.943	91,73%	100%
	Penyediaan jasa surat menyurat	4.400.000	2.640.000	60,00%	94%
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	93.124.400	66.525.193	71,44%	100%
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	79.549.800	67.400.000	84,73%	100%
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	75.703.500	75.517.500	99,75%	100%
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	17.500.000	14.070.000	80,40%	78%
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	44.221.800	42.649.400	96,44%	100%
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	50.905.300	39.779.000	78,14%	78%
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	15.236.300	14.979.800	98,32%	98%
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	61.600.000	52.392.500	85,05%	57%
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12.300.000	12.000.000	97,56%	98%
	Penyediaan makanan dan minuman	36.000.000	16.280.000	45,22%	23%

	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	453.500.000	448.422.550	98,88%	127%
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	169.200.000	168.550.000	99,62%	102%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	468.099.900	424.463.066	90,68%	100%
	Pengadaan mebeleur	5.100.000	3.950.000	77,45%	100%
	Pengadaan Komputer	78.950.000	78.771.000	99,77%	100%
	Pengadaan Alat-alat Studio	9.800.000	9.700.000	98,98%	100%
	Pengadaan Perlengkapan Kantor	49.150.000	49.150.000	100,00%	100%
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	60.530.000	60.530.000	100,00%	100%
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	264.569.900	222.362.066	84,05%	100%
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	66.000.000	66.000.000	100,00%	100%
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	44.000.000	44.000.000	100,00%	100%
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	22.000.000	22.000.000	100,00%	100%
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	138.500.000	132.371.000	95,57%	100%
	Pendidikan dan pelatihan formal	12.000.000	7.120.000	59,33%	100%
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	126.500.000	125.251.000	99,01%	131%
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	106.489.100	103.420.000	97,12%	109,8%
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2.748.900	2.640.000	96,04%	100%
	Monitoring, Pengendalian dan Pembuatan Laporan Pelaksanaan Kegiatan APBD	8.710.200	6.300.000	72,33%	100%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	95.030.000	94.480.000	99,42%	100%
6	Program peningkatan pelayanan angkutan	13.770.000	-	0,00%	31,60%
	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan	13.770.000	-	0,00%	0%
7	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	418.975.000	410.515.000	97,98%	165,00%
	Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor	209.975.000	203.715.000	97,02%	165%
	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana prasarana pengujian kendaraan bermotor	209.000.000	206.800.000	98,95%	100%
8	Program Peningkatan Pelayanan dan Fasilitas Keselamatan Perhubungan	4.578.132.000	4.432.628.167	96,82%	51,82%

	Pemeliharaan PJU	4.481.165.000	4.339.984.667	96,85%	100%
	Pemeliharaan Rambu, APILL, pagar pengaman jalan, pita penggaduh dan Halte	96.967.000	92.643.500	95,54%	100%
9	Program Pembangunan Sarana Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	401.480.000	290.080.000	80,14%	100%
	Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan	6.500.000	6.500.000	100,00%	100%
	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat	87.590.000	59.540.000	67,98%	125%
	Pengamanan dan Pengendalian Parkir	307.390.000	224.040.000	72,88%	100%
10	Program Pengendalian dan pengawasan keselamatan lalu lintas	845.800.000	841.350.000	99,47%	109%
	Pengendalian dan pengaman lalu lintas pada hari-hari tertentu	174.500.000	174.450.000	99,97%	108%
	Pengawasan dan pengendalian keselamatan lalu lintas	671.300.000	666.900.000	99,34%	100%
J U M L A H		8.150.487.100	7.722.033.176	94,74%	88,00%

Untuk anggaran belanja tidak langsung Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan dianggarkan sebesar Rp. 3.031.320.000,-. Anggaran tersebut digunakan untuk belanja pegawai pada tahun 2020 dengan jumlah realisasi Rp. 2.937.422.958,- atau 96,90% dari jumlah yang dianggarkan. Sisa anggaran berjumlah Rp. 93.897.042,-.

Berdasarkan perbandingan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung adalah mencapai 72,89% : 37,19% atau hampir mencapai 2 : 1. Dengan proporsi perbandingan anggaran tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan menggunakan anggaran yang disediakan dalam APBD sebagian besar digunakan untuk program kegiatan pembangunan.

Sedangkan untuk Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel T-C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN									
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Baik		100%	100%	100%	100%	100%	100%	

*Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan
Tahun 2022*

	Tingkat Disiplin Aparatur		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Tingkat Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Nilai (Predikat) Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan		61	62	68.10	109.8	63	63	
	Persentase Temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah yang disusun		36	9	9	100%	10	55	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja dan Renstra Perangkat Daerah yang disusun		8	2	2	100%	3	13	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA dan DPA Dinas Perhubungan		16	4	4	100%	4	24	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		8	2	2	100%	2	12	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun		48	12	12	100%	12	72	
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		48	12	12	100%	12	72	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		-	-	-	-	-	-	

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Waktu Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		48	12	12	100%	12	72	
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		48	12	12	100%	12	72	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		197	88	88	100%	110	395	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal		5	1	1	100%	1	7	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		71	16	21	131%	18	110	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		48	12	12	100%	12	72	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		956	329	324	98%	275	1.555	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		440	54	31	57%	86	557	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		896.106	169.684	132.952	78%	162.650	1.191.708	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		526	123	120	98%	86	133.564	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan		541	83	105	127%	120	781	

	Jumlah makan dan minum yang disediakan untuk mendukung kegiatan rapat		5.160	1.800	407	23%	2.000	7.567	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		48	12	12	100%	12	72	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar yang dikelola		3.600	900	848	94%	900	5.348	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		48	12	12	100%	12	72	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		48	12	12	100%	12	72	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		48	12	12	100%	12	72	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bulan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		48	12	12	100%	12	72	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bulan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		48	12	12	100%	12	72	
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase desa yang dilayani angkutan umum		15.8%	50%	15.8%	31.6%	56%	28.48%	
	Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan		82%	91%	151%	165%	100%	100%	
	Persentase pemenuhan kebutuhan fasilitas jalan pada jalan kabupaten		42.84%	83.11%	42.84%	51.55%	100%	42.84%	

	Persentase sarana prasarana terminal yang memadai		38%	38%	38%	100%	46%	46%	
	Persentase sarana prasarana perparkiran yang memadai		22%	33%	33%	100%	44%	44%	
	Persentase pelanggaran angkutan umum penumpang dan barang		45%	43%	43%	100%	39%	39%	
Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan kabupaten/kota	Persentase perlengkapan jalan yang terpasang		42.84%	83.11%	42.84%	51.55%	100%	42.84%	
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Persentase Perlengkapan Jalan Yang terpelihara		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah PAD dari retribusi pelayanan terminal		43.500.000	6.000.000	7.500.000	125%	6.000.000	57.000.000	
Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah PAD dari retribusi pelayanan terminal		43.500.000	6.000.000	7.500.000	125%	6.000.000	57.000.000	
Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah titik parkir yang dikelola		576	168	168	100%	168	912	
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah titik parkir yang dikelola		576	168	168	100%	168	912	
Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan		82%	91%	151%	165%	100%	100%	
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah penyediaan sarana dan Prasarana Pengujian Berkala kendaraan bermotor		5	-	-	0%	1	6	

Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan yang laik jalan		775	860	1.423	165%	950	950	
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang terpelihara		7	4	4	100%	3	14	
Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengawasan dan pengendalian keselamatan lalu lintas yang dilaksanakan		400	200	206	103%	200	806	
	Frekuensi Koordinasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilaksanakan		-	-	-	0%	1	1	
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengawasan & Pengendalian Keselamatan Lalu lintas yang dilaksanakan		400	200	206	103%	200	806	
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil rapat forum lalu lintas dan angkutan jalan		-	-	-	0%	1	1	
Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan		150	-	-	0%	50	200	
	Jumlah Leaflet atau brosur yang disebarakan		1.000	1.000	1.000	0%	1.300	3.300	
Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan		150	-	-	0%	50	200	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Leaflet atau brosur yang disebarakan		1.000	1.000	1.000	0%	1.300	3.300	
Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah SDM Perhubungan yang mengikuti pembinaan		40	-	-	0%	50	90	

	Jumlah Peserta yang terpilih mengikuti Pemilihan Abdi Yasa Teladan Tingkat Nasional		-	-	-	0%	3	3	
Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ	Jumlah SDM Perhubungan yang mengikuti pembinaan		40	-	-	0%	50	90	
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil Inspeksi, Audit & Pemantauan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten / Kota yang memenuhi Persyaratan		-	-	-	0%	3	3	
Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan angkutan umum		1	1	-	0%	1	2	
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan angkutan umum		1	1	-	0%	1	2	

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN

Capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan, mengacu pada RPJMD Kabupaten Balangan tahun 2016-2021 dengan Mewujudkan misi ke III Kepala Daerah yakni Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkesinambungan. Dalam mewujudkan misi tersebut, Dinas Perhubungan mempunyai sasaran yaitu : Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas Jalan serta Meningkatnya PAD Sektor Perhubungan Darat. Dimana untuk mengukur tercapainya sasaran tersebut ada indikator kinerja yang harus dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan yaitu : Angka Kecelakaan Lalu Lintas Jalan ; PAD Sektor Perhubungan Darat.. Indikator sasaran Angka Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dengan kriteria sangat baik dan indikator sasaran PAD Sektor Perhubungan Darat dengan kriteria sangat memuaskan sehingga Rata rata Persentase Sasaran dengan capaian 152,6% dengan kriteria sangat tinggi.

Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2020 menunjukkan bahwa kinerja Dinas Perhubungan sudah mulai meningkat namun tetap harus terus melakukan pembinaan dan bimbingan dalam menyusun perencanaan bukan hanya bagi SKPD tetapi juga bagi SDM Dinas Perhubungan. Keberhasilan dan kegagalan kinerja sangat dipengaruhi oleh kompetensi sumber daya manusia di dalam organisasi. Meskipun jabatan struktural di Dinas Perhubungan sebagian besar terisi, namun banyak diantaranya yang kurang memiliki pengalaman teknis penyusunan perencanaan daerah. Untuk jabatan fungsional tertentu (perencana) Dinas Perhubungan belum memiliki SDM tersebut. Keterbatasan tersebut berpengaruh pada ketelitian di dalam memverifikasi perencanaan yang disusun, memberikan asistensi yang tepat dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan perencanaan tersebut. Mengingat keterbatasan SDM, maka kinerja yang diharapkan belum dapat tercapai sesuai target dan harapan.

Salah satu indikasi kegagalan kinerja adalah adanya indikator kinerja yang belum terukur ataupun kesalahan ketika menentukan target capaian. Untuk menekan terjadinya kegagalan kinerja tersebut, Dinas Perhubungan terus meningkatkan kompetensinya melalui pelatihan-pelatihan. Banyak hal yang mempengaruhi keberhasilan ataupun kegagalan kinerja, baik faktor-faktor internal maupun faktor eksternal. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Dinas Perhubungan tahun 2020, Kinerja Dinas Perhubungan sudah sangat baik namun perlu ditingkatkan. Realisasi kinerja yang dapat dicapai Dinas Perhubungan tahun 2020 dapat dijabarkan bahwasanya dari 2 (dua) sasaran dan 2 (dua) indikator yang diampu terdapat 2

(dua) indikator yang melebihi capaian yaitu indikator “*Angka Kecelakaan Lalu Lintas Jalan*” dengan capaian sebesar 175% dan indikator “*PAD Sektor Perhubungan Darat*” dengan capaian sebesar 130,20%. Kinerja Dinas Perhubungan adalah totalitas hasil kerja yang dicapai Dinas Perhubungan yang tidak terlepas dari kinerja sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan, yang dijalankan oleh SDM yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan SKPD.

Dalam menyelenggarakan fungsi dan tugas pokok Dinas Perhubungan yaitu merumuskan kebijakan teknis bidang perhubungan, Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan selalu proaktif, kreatif dan profesional.

Disamping sebagai dinas teknis yang merumuskan kebijakan teknis bidang perhubungan, Dinas Perhubungan juga diberi tanggung jawab sebagai salah satu dinas penghasil untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) berupa retribusi parkir tepi jalan umum, retribusi terminal, retribusi pengujian kendaraan bermotor. Pada tahun 2020 target PAD yang dibebankan pada Dinas Perhubungan adalah senilai Rp. 146.000.000,00,- dan realisasinya yaitu sebesar 130,19% atau sebesar Rp. 190.075.000,00.

Capaian target PAD tersebut menunjukkan bahwa kinerja Dinas Perhubungan masih berada pada *track* yang benar dan menunjukkan performa yang baik, walaupun demikian, beberapa permasalahan yang masih memerlukan penyelesaian lebih lanjut seperti Pengawasan operasional yang meliputi pengawasan kelaikan kendaraan, kapasitas muatan yang diizinkan, dan pemanfaatan terminal yang hingga sekarang juga masih belum optimal.

Beberapa langkah penyelesaian permasalahan tersebut antara lain dengan Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada, Mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana secara bertahap setiap tahun terutama sarana dan prasarana yang mendukung untuk mengimbangi kemajuan teknologi khususnya yang berhubungan dengan pemenuhan tugas, pokok dan fungsi masing – masing seksi, Meningkatkan kemampuan keahlian personil, melalui pengiriman personil untuk mengikuti diklat teknis maupun fungsional baik yang diselenggarakan oleh Badan Diklat Perhubungan, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Balangan maupun lembaga teknis terkait setiap tahunnya serta Memberdayakan pegawai yang ada dengan pembekalan kepada petugas operasional / lapangan tentang peraturan lalu lintas dan angkutan.

Untuk pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan
Seksi Pengujian Sarana

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(10)	(12)
1	Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan	-	-	680 kend	775 kend	860 kend	950 kend	1.040 kend	1.210 kend	1.423 kend	1.423 kend
2	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	-	-	B	B	B	B	B 82,78	B 82,83	B 82,98	B 83,00
3	PAD Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	-	-	40 Juta	55 Juta	70 Juta	95 Juta	68,95 Juta	99,125 Juta	113,175 Juta	115 Juta

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan
Seksi Prasarana

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(10)	(12)
1	Titik Parkir yang dikelola	-	-	13 Titik	14 Titik	14 Titik	14 Titik	13 Titik	14 Titik	14 Titik	14 Titik
2	PAD Retribusi Parkir	-	-	60 Juta	70 Juta	70 Juta	70 Juta	75,55 Juta	86,85 Juta	69,4Juta	70 Juta
3	PAD Retribusi Terminal	-	-	6 Juta	6 Juta	6 Juta	6 Juta	10 Juta	7,3 Juta	7,5 Juta	7,5 Juta

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan
Seksi Lalu Lintas

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(10)	(12)
1	Persentase PJU dalam keadaan baik	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Rambu, APILL, pagar pengaman jalan, pita pengaduh dan halte dalam keadaan baik	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Aktivitas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan berfokus pada perwujudan kondisi transportasi dan infrastruktur perhubungan yang handal dalam rangka menunjang kemajuan dan pertumbuhan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Berikut ini adalah aspek-aspek pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan :

1. Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor
2. Pelayanan Penerangan Jalan Umum
3. Pelayanan Terminal
4. Pelayanan Perparkiran
5. Penyediaan dan pemeliharaan alat perlengkapan jalan

Kelima aspek pelayanan di atas merupakan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan dalam rangka perwujudan visi dan misi Kepala Daerah. Secara umum, keenam aspek pelayanan tersebut dapat terealisasi sesuai dengan target dan ketentuannya, dengan berbagai identifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor

Permasalahan inti pada proses pengujian kendaraan bermotor diantaranya adalah belum optimalnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia atau tenaga ahli penguji. Sampai dengan akhir tahun 2020 jumlah tenaga penguji adalah 4 personil.

2. Pelayanan Penerangan Jalan Umum

Jaringan Listrik Penerangan Jalan Umum merupakan kelengkapan jalan yang sangat penting bagi keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan. Permasalahan utama pada aspek pelayanan ini adalah belum optimalnya pemerataan jaringan listrik PJU di seluruh wilayah Kabupaten Balangan. Pemasangan jaringan listrik PJU bersumber dana terbatas dari APBD Kabupaten. Di samping itu permasalahan utama adalah pada keterbatasan personil ahli ketenagalistrikan PJU. Yang perlu mendapatkan perhatian lebih adalah pemeliharaan PJU mengingat selama ini sering kali adanya laporan dari masyarakat karena adanya lampu PJU yang padam. Anggaran untuk pemeliharaan PJU khususnya pengadaan suku cadang PJU lebih ditingkatkan agar supaya setiap ada laporan kerusakan PJU dapat segera ditindaklanjuti.

3. Pelayanan Terminal

Identifikasi permasalahan utama keterminalan adalah belum optimalnya fungsi terminal sebagai tempat pemberhentian dan pemberangkatan penumpang. Hal ini lebih disebabkan pada kondisi tata letak terminal kaitannya dengan pusat-pusat kegiatan wilayah, terutama pusat-pusat perbelanjaan atau pasar. Oleh karena itu fasilitas-fasilitas terminal yang dimiliki kurang termanfaatkan oleh masyarakat, yang berpengaruh pada belum optimalnya pendapatan dari sektor terminal.

4. Pelayanan Perparkiran

Masalah penataan lokasi perparkiran masih menjadi poin penting permasalahan pada aspek pelayanan ini. Yang menjadi permasalahan dari pelayanan parkir disini adalah Munculnya parkir liar. Hal ini berdampak pada keresahan masyarakat dengan adanya pungutan parkir liar. Pengendalian yang harus ada untuk mengatasi masalah ini adalah Pembentukan Tim Pengendalian dan Pengawasan Parkir dengan melibatkan Salpol PP, Kepolisian dan TNI AD

5. Penyediaan dan pemeliharaan alat perlengkapan jalan

Perlengkapan jalan yang menjadi fokus penyediaan dan pemeliharaan adalah rambu-rambu petunjuk, alat pemberi isyarat lalu lintas dan marka jalan. Secara umum pengadaan perlengkapan jalan telah terealisasi sesuai dengan target. Permasalahan umum yang sering terjadi adalah resiko kehilangan dan kerusakan yang cukup tinggi, sementara alat-alat atau kelengkapan tersebut merupakan barang modal atau tercatat sebagai aset pemerintah. Hal ini yang seringkali menjadi permasalahan dalam inventarisasi aset pemerintah.

Tantangan yang harus dihadapi dan peluang yang ada untuk pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan berdasarkan hasil telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Balangan, antara lain dari perwujudan sistem kota di wilayah Kabupaten Balangan yang memberikan peluang dan sekaligus tantangan bagi pengembangan pelayanan perhubungan yaitu pembangunan terminal baru pada pusat pusat kegiatan / perkotaan. Disamping itu dengan adanya rencana perwujudan sistem jaringan trayek serta telah dibangunnya jembatan baru di jalan lingkaran timur yang menghubungkan Muara Pitap Kecamatan Paringin Selatan dengan Gunung Pandau Kecamatan Paringin, juga memberikan peluang dan tantangan pada pelayanan dinas lima tahun kedepan seperti, penyiapan sarana / perlengkapan lalu lintas, dan tantangan mengenai pengkajian potensi dan permasalahan dalam lingkup manajemen dan rekayasa lalu lintas dimasa yang akan datang.

Terkait pembangunan bidang perhubungan di Kabupaten Balangan, dapat dilihat pada aspek aspek sebagai berikut :

1. Pembangunan Terminal

Terminal yang ada di Kabupaten Balangan belum terfungsikan sesuai dengan ketentuan dan target pendapatan per tahun. Sedangkan tantangan utama pembangunan dan pembenahan terminal adalah fungsi terminal sebagai tempat pemberangkatan dan pemberhentian penumpang dapat dioptimalkan. Di samping itu adalah optimalisasi pemanfaatan seluruh fasilitas terminal bagi penumpang dan para pengusaha angkutan dan pedagang. Hal ini sangat berpengaruh terhadap perolehan pendapatan daerah dari sektor ini. Tantangan sekaligus perencanaan pembangunan jangka menengah adalah

pembangunan terminal baru untuk menjamin konektivitas transportasi darat di wilayah Kabupaten Balangan. Terminal ini akan memiliki aktivitas dengan intensitas tinggi karena berfungsi sebagai terminal angkutan antar kota antar provinsi. Hal ini merupakan peluang besar bagi Kabupaten Balangan dalam rangka menunjang pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat, terutama dalam meningkatkan pendapatan daerah dari sektor terminal.

2. Pengujian Kendaraan Bermotor

Pengujian kendaraan bermotor merupakan aspek pelayanan utama yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan. Aspek pelayanan ini sangat penting dalam rangka mewujudkan kondisi kelaikan operasional kendaraan bermotor terutama angkutan umum orang dan barang. Pengujian dilakukan secara berkala tiap 6 bulan sekali untuk mengendalikan dan mengurangi tingkat kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh buruknya kondisi kendaraan bermotor.

Secara umum pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tarif mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Balangan. Hal ini ditunjang oleh keberadaan mesin alat uji kendaraan dan personil penguji dan calon penguji yang berkompeten. Di samping itu ditunjang pula oleh standar Operasional Prosedur (SOP) baku dengan prinsip efektif, efisien, cermat dan akuntabel. Tantangan besar sekaligus peluang pada aspek pelayanan ini adalah prediksi peningkatan volume kendaraan wajib uji seiring dengan pesatnya pembangunan infrastruktur di wilayah Kabupaten Balangan.

Tantangannya adalah perwujudan sistem pengujian yang lebih efisien yang ditunjang oleh kuantitas dan kualitas tenaga penguji serta alat uji yang handal sesuai standar yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan. Sistem pengujian yang diharapkan adalah suatu system yang menjamin validitas, kecermatan, ketelitian, kejelasan prosedur dan biaya, serta bebas dari peluang kolusi dan nepotisme. Di sampingitu adalah adanya sistem perbengkelan yang menjamin kelaikan mesin kendaraan bagi kendaraan yang belum layak uji. Hal ini sangat berpotensi bagi peningkatan pendapatan daerah dari sektor ini.

3. Penerangan Jalan Umum

Adanya perubahan kebijakan masalah PJU yang mulai tahun 2017 menjadi tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perhubungan, Pemenuhan kebutuhan PJU masih terus dilakukan secara bertahap. Tantangan utama dalam pengelolaan jaringan listrik PJU adalah penciptaan sistem yang tepat dan akurat dalam pemeliharaan jaringan sehingga bisa memastikan bahwa seluruh jaringan berfungsi dengan baik. Sistem tersebut juga berkepentingan untuk meminimalisir munculnya jaringan-jaringan listrik ilegal yang sangat merugikan. Dalam hal ini diperlukan adanya fondasi data base yang representatif sebagai modal awal terwujudnya sistem tersebut. Peningkatan pertumbuhan jaringan listrik PJU sangat berbanding lurus dengan pertumbuhan dinamisasi kehidupan masyarakat, karena malam hari tidak lagi menjadi hambatan untuk masyarakat melakukan aktivitas sosial dan ekonominya. Di samping itu berpengaruh pula pada kemajuan industri-industri lokal dan nasional. Aktivitas perindustrian terutama yang berskala besar sangat berkepentingan terhadap penyediaan jaringan listrik PJU, sehingga mobilisasi usaha terus dinamis tanpa dibatasi oleh waktu. Potensi ini merupakan peluang besar, yaitu ketika pemerintah berkemampuan untuk melengkapi jaringan listrik PJU, maka hal ini akan berpengaruh besar terhadap peningkatan pendapatan daerah dari sektor PJU.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2022, merupakan tahun awal RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 yang disusun dan ditetapkan setelah pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2020 berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih . RKPD Tahun 2022 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana Kerja SKPD Tahun 2022. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan SKPD Dinas Perhubungan. Secara keseluruhan, Hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

TABEL T-C. 31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD SKPD TAHUN 2022
KABUPATEN BALANGAN

SKPD : DINAS PERHUBUNGAN

NO	Rancangan Awal RKPD SKPD				Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kelancaran Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	944.755.400	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kelancaran Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	950.000.000	-
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah yang disusun	9 Dokumen	89.880.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah yang disusun	9 Dokumen	89.880.000	-
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja Perangkat Daerah yang disusun	2 Dok	87.180.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja Perangkat Daerah yang disusun	2 Dok	87.180.000	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dok	2.700.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dok	2.700.000	-
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	56.886.000	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	56.886.000	-
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	-	-

	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Waktu Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan	56.886.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Waktu Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan	56.886.000	-
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	98.903.000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	98.903.000	-
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	23 Orang	98.903.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	23 Orang	98.903.000	-
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	305.265.500	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	310.510.100	-
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	93 Buah	4.645.100	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	93 Buah	4.645.100	-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32 Buah	34.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32 Buah	34.000.000	-
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	21.475 Lembar	20.268.400	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	21.475 Lembar	20.268.400	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakanJumlah makan dan minum yang disediakan untuk mendukung kegiatan rapat	109 Kali1000 Porsi	241.552.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakanJumlah makan dan minum yang disediakan untuk mendukung kegiatan rapat	109 Kali1000 Porsi	246.796.600	-

5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	150.903.900	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	150.903.900	-
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar yang dikelola	900 Surat	5.550.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar yang dikelola	900 Surat	5.550.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	73.400.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	73.400.000	-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	71.953.900	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	71.953.900	-
6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	242.917.000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	242.917.000	-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	72 Unit/Tahun	195.397.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	72 Unit/Tahun	195.397.000	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang mendapat Pemeliharaan	60 Buah/Tahun	47.520.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang mendapat Pemeliharaan	60 Buah/Tahun	47.520.000	-
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan	82%	2.055.244.600	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan	2 org	6.520.209.100	-
Persentase perlengkapan jalan yang terpasang dengan kebutuhan perlengkapan jalan kabupaten		20%	Persentase perlengkapan jalan yang terpasang dengan kebutuhan perlengkapan jalan kabupaten			25 org	-		
Persentase desa terlayani angkutan umum		24,2%	Persentase desa terlayani angkutan umum			B dan 100%	-		

7	Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Jumlah Kajian dan Peraturan yang disusun	1 Laporan	6.500.000	Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Jumlah Kajian dan Peraturan yang disusun	1 Laporan	6.500.000	-
	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Brosur/Leaflet Sosialisasi	500 Lembar	6.500.000	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Brosur/Leaflet Sosialisasi	500 Lembar	6.500.000	
8	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan kabupaten/kota	Persentase perlengkapan jalan yang terpasang	20%	543.375.100	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan kabupaten/kota	Persentase perlengkapan jalan yang terpasang	30%	4.837.375.100	-
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Perlengkapan Jalan Yang terpasang	20%	33.000.000	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Perlengkapan Jalan Yang terpasang	30%	367.000.000	Pengadaan Rambu Elektronik dan Warning light
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Persentase Perlengkapan Jalan Yang terpelihara	100%	510.375.100	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Persentase Perlengkapan Jalan Yang terpelihara	100%	4.470.375.100	Pembayaran rekening listrik PJU
9	Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah PAD dari retribusi pelayanan terminal	6.000.000	94.690.000	Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah PAD dari retribusi pelayanan terminal	6.000.000	94.690.000	-
	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah SDM yang mengikuti Diklat Pengelola Terminala Tipe C	1 Orang	94.690.000	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah SDM yang mengikuti Diklat Pengelola Terminala Tipe C	1 Orang	94.690.000	
10	Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah titik parkir yang dikelola	168 Titik/Bulan	132.690.000	Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah titik parkir yang dikelola	168 Titik/Bulan	132.690.000	-
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah titik parkir yang dikelola	168 Titik/Tahun	132.690.000	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah titik parkir yang dikelola	168 Titik/Tahun	132.690.000	-

11	Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan	82%	571.924.500	Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan	82%	576.964.000	-
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah penyediaan sarana dan Prasarana Pengujian Berkala kendaraan bermotor	1 unit (sideslip tester)	253.350.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah penyediaan sarana dan Prasarana Pengujian Berkala kendaraan bermotor	1 unit (sideslip tester)	253.350.000	-
	Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat	2 orang	20.000.000	Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat	2 orang	20.000.000	-
	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan yang laik jalan	1.494 kendaraan	135.174.500	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan yang laik jalan	1.494 kendaraan	140.114.000	-
	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Bukti Lulus Uji	2.000 set	50.000.000	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Bukti Lulus Uji	2.000 set	50.000.000	-
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Alat Uji yang terpelihara	10 buah	113.400.000	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Alat Uji yang terpelihara	10 buah	113.500.000	-
12	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan kabupaten/Kota	Jumlah Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang diselenggarakan	3 Buah	645.065.000	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan kabupaten/Kota	Jumlah Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang diselenggarakan	3 Buah	654.965.000	
	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengawasan & Pengendalian Keselamatan Lalu lintas yang dilaksanakan	200 Kegiatan	635.065.000	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengawasan & Pengendalian Keselamatan Lalu lintas yang dilaksanakan	200 Kegiatan	644.965.000	
	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil rapat forum lalu lintas dan angkutan jalan	1 Laporan	10.000.000	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil rapat forum lalu lintas dan angkutan jalan	1 Laporan	10.000.000	-

13	Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Laporan hasil audit berupa rekomendasi & Jumlah Laporan hasil Inpeksi berupa laporan keadaan & Kinerja obyek yang diinspeksi dalam rangka peningkatan keselamatan lalu lintas angkutan jalan	1	6.375.000	Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Laporan hasil audit berupa rekomendasi & Jumlah Laporan hasil Inpeksi berupa laporan keadaan & Kinerja obyek yang diinspeksi dalam rangka peningkatan keselamatan lalu lintas angkutan jalan	1	6.375.000	-
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten / Kota yang memenuhi Persyaratan	Jumlah laporan hasil Inspeksi, Audit & Pemantauan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten / Kota yang memenuhi Persyaratan	1 laporan	6.375.000	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil Inspeksi, Audit & Pemantauan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten / Kota yang memenuhi Persyaratan	1 laporan	6.375.000	-
14	Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan angkutan umum	1 Unit	54.625.000	Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan angkutan umum	2 Unit	210.650.000	-
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan angkutan umum	1 Unit	54.625.000	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan angkutan umum	2 Unit	210.650.000	
	JUMLAH TOTAL			3.000.000.000	JUMLAH TOTAL			7.470.209.100	

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Berkenaan dengan usulan program dan kegiatan masyarakat dimana dalam hal ini diperoleh dari hasil Musrenbang Kecamatan, untuk tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

TABEL T-C.32
FORM HASIL MUSRENBANG KECAMATAN TAHUN 2021
YANG TER VERIFIKASI DAN DAPAT DI AKOMODIR DI RENJA 2022

SKPD : DINAS PERHUBUNGAN

AKOMODIR MUSRENBANG KECAMATAN

NO	PAKET PEKERJAAN	USULAN DESA	KECAMATAN	LOKASI	DIAKOMODIR / TIDAK DIAKOMODIR*	ALASAN
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
1	Lampu Perhatian Kedap Kedip	Bungur	Batumandi	RT. 03	TIDAK DIAKOMODIR	Pagu indikatif tidak mencukupi
2	Lampu Tenaga Surya	Bungur	Batumandi	RT. 01, 02, 03, 04	TIDAK DIAKOMODIR	- " -
3	Lampu PUJ Tenaga Surya	Riwa	Batumandi	Riwa	TIDAK DIAKOMODIR	- " -
4	Perbaikan PJU	Tanah Habang Kanan	Lampihong	RT 1 dan 2	TIDAK DIAKOMODIR	- " -
5	Lampu Penerangan jalan (tenaga surya)	Lok Hamawang	Lampihong	RT 03	TIDAK DIAKOMODIR	- " -
6	Pengadaan Lampu Tenaga Surya	Mundar	Lampihong	RT 1 s/d RT 4	TIDAK DIAKOMODIR	- " -
7	Pengadaan Listrik Tenaga Surya	Kandang Jaya	Lampihong	RT 1,2,3 dan 4	TIDAK DIAKOMODIR	- " -

8	Pemasangan lampu solar cell	Kel. Paringin Timur	Paringin	RT.008	TIDAK DIAKOMODIR	- " -
9	Tiang lampu untuk perbatasan simpang 4 sampai perbatasan Balida	Kel. Paringin Timur	Paringin	RT.010	TIDAK DIAKOMODIR	- " -
10	Lampu jalan di tiang PLN (PJU)	Kel. Paringin Timur	Paringin	RT.011	TIDAK DIAKOMODIR	- " -
11	Lampu PJU solar cell	Kel. Paringin Timur	Paringin	RT.02	TIDAK DIAKOMODIR	- " -
12	Lampu PJU solar cell	Kel. Paringin Timur	Paringin	RT.03	TIDAK DIAKOMODIR	- " -
13	Lampu PJU solar cell	Kel. Paringin Timur	Paringin		TIDAK DIAKOMODIR	- " -
14	Lampu PJU solar cell	Kel. Paringin Kota	Paringin	Sepanjang Jalan RT.07	TIDAK DIAKOMODIR	- " -
15	Lampu PJU solar cell	Kel. Paringin Kota	Paringin	RT.11	TIDAK DIAKOMODIR	- " -
16	Lampu PJU solar cell	Kel. Paringin Kota	Paringin	RT.13	TIDAK DIAKOMODIR	- " -
17	Lampu PJU solar cell	Kel. Paringin Kota	Paringin	Hambawang Permai	TIDAK DIAKOMODIR	- " -
18	Lampu PJU solar cell	Kel. Paringin Kota	Paringin	RT.17	TIDAK DIAKOMODIR	- " -
19	Penambahan Lampu PJU	Kel. Paringin Kota	Paringin	Perumahan Muhibbin	TIDAK DIAKOMODIR	- " -
20	Tenaga Surya	Paran	Paringin	RT 01 Dan RT 02	TIDAK DIAKOMODIR	- " -
21	PJU	Lamida	Paringin	Lamida RT 1 & 2	TIDAK DIAKOMODIR	- " -
22	Lampu Tenaga Surya	Kalahiang	Paringin	RT. 01 Dan RT. 02	TIDAK DIAKOMODIR	- " -

23	Penerangan Jalan	Lasung Batu	Paringin	Lasung Batu RT.04	TIDAK DIAKOMODIR	- " -
24	Lampu Jalan Raya	Balida	Paringin	Balida	TIDAK DIAKOMODIR	- " -
25	Penerangan Jalan Umum	Sungai Ketapi	Paringin	Sungai Ketapi RT.1,2,3	TIDAK DIAKOMODIR	- " -
26	Lampu Tenaga Surya	Balang	Paringin	RT. 01 & 02	TIDAK DIAKOMODIR	- " -
27	Pengadaan Rambu-rambu Jalan dan PJU	Bungin	Paringin Selatan	Bungin RT.001, RT.002 , RT.003 dan RT.004	TIDAK DIAKOMODIR	- " -
28	Penerangan Jalan	Halubau Utara	Paringin Selatan	Halubau Utara	TIDAK DIAKOMODIR	- " -
29	Penerangan Jalan Umum (PJU) Tenaga Surya	Halubau	Paringin Selatan	Halubau	TIDAK DIAKOMODIR	- " -
30	Pengadaan Lampu Listrik Tenaga surya	Kel. Batu Piring	Paringin Selatan	RT. 03 Kel. Batu Piring	TIDAK DIAKOMODIR	- " -
31	Pengadaan dan pemasangan PJU listrik	Sumber Rejeki	Juai	Kec. Juai	TIDAK DIAKOMODIR	- " -
32	PJU Tenaga Surya	Sumber Rejeki	Juai	Sumber Rejeki	TIDAK DIAKOMODIR	- " -
33	Penerangan Jalan Umum	Tawahan	Juai		TIDAK DIAKOMODIR	- " -
34	Pengadaan Cermin Jalan	Muara Ninian	Juai	RT. 02	TIDAK DIAKOMODIR	- " -
35	Pengadaan PJU (Pnerang Jalan Umum)	Gulinggang	Juai	RT. 01,02,03	TIDAK DIAKOMODIR	- " -
36	Lampu PJU Tenaga Surya	Sungsum	Tebing Tinggi	RT. 001, 002, 003, 004	TIDAK DIAKOMODIR	- " -
37	Penerangan Jalan Desa	Langkap	Tebing Tinggi	RT. 003	TIDAK DIAKOMODIR	- " -

Program kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan yang diusulkan untuk pendanaan APBD Provinsi Kalimantan Selatan TA. 2022 telah dilakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan melalui forum Musrenbang Provinsi Kalimantan Selatan dan telah mendapatkan persetujuan untuk diakomodir pada Renja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan TA. 2022 adalah sebagaimana tersebut pada tabel berikut :

**USULAN KEGIATAN PENYEDIAAN FASILITAS PERLENGKAPAN JALAN
SUMBER ANGGARAN APBD TINGKAT I PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2022
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BALANGAN**

A. PENGADAAN DAN PEMASANGAN RAMBU LALU LINTAS

NO	NAMA RUAS JALAN	NOMOR RUAS	PANJANG RUAS (KM)	VOLUME	SATUAN	PAGU	KETERANGAN
1	Lampihong - Mantimin	024	11,08	60	Unit	Rp 68.239.527	Belum ada rambu
2	Birayang - Lok Batu - Batumandi	022	23,17	100	Unit	Rp 113.732.545	Belum ada rambu
JUMLAH				160	Unit	Rp 181.972.073	

B. PENGADAAN DAN PEMASANGAN RAMBU PENDAHULUAN PENUNJUK JURUAN

NO	NAMA RUAS JALAN	NOMOR RUAS	PANJANG RUAS (KM)	VOLUME	SATUAN	PAGU	KETERANGAN
1	Lampihong - Mantimin	024	11,08				
	a. Simpang 3 Mampari			3	unit	Rp 40.659.808	
2	Paringin - Halong	026	31,78				
	a. Simpang 3 Muara Ninian			3	unit	Rp 40.659.808	
	b. Simpang 3 Juai			3	unit	Rp 40.659.808	
	c. Simpang 3 Binjai punggol			3	unit	Rp 40.659.808	
JUMLAH				12	unit	Rp 162.639.232	

C. PENGADAAN DAN PEMASANGAN ALAT PENERANGAN JALAN (APJ) TENAGA SURYA

NO	NAMA RUAS JALAN	NOMOR RUAS	PANJANG RUAS (KM)	VOLUME	SATUAN	PAGU	KETERANGAN
1	Lampihong - Mantimin	024	11,08	10	unit	Rp 383.708.669	
2	Lampihong - Paringin	025	11,46	10	unit	Rp 383.708.669	
3	Paringin - Halong	026	31,78	10	unit	Rp 383.708.669	
JUMLAH				30	unit	Rp 1.151.126.006	

D. PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU PERINGATAN (WARNING LIGHT)

NO	NAMA RUAS JALAN	NOMOR RUAS	PANJANG RUAS (KM)	VOLUME	SATUAN	PAGU	KETERANGAN
1	Lampihong - Mantimin	024	11,08				
	a. Simpang 3 Banua Hanyar			1	unit	Rp 43.148.464	
	b. Simpang 3 Mampari			3	unit	Rp 129.445.393	
2	Lampihong - Paringin	025	11,46				
	a. Simpang 3 Jembatan layap			1	unit	Rp 43.148.464	terpasang 1
3	Paringin - Halong	026	31,78				
	a. Simpang 3 Muara Ninian			1	unit	Rp 43.148.464	
JUMLAH				6	unit	Rp 258.890.787	

E. PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN FASILITAS PERLENGKAPAN JALAN

NO	NAMA RUAS JALAN	NOMOR RUAS	PANJANG RUAS (KM)	VOLUME	SATUAN	PAGU	KETERANGAN
1	Lampihong - Mantimin	024	11,08				
	a. Alat Penerangan Jalan (APJ)			4	unit	Rp 40.000.000	
2	Lampihong - Paringin	025	11,46				
	a. Lampu Peringatan (Warning Light)			3	unit	Rp 30.000.000	
3	Paringin - Halong	026	31,78				
	a. Alat Penerangan Jalan (APJ)			6	unit	Rp 60.000.000	
JUMLAH				13	unit	Rp 130.000.000	

**DAFTAR USULAN RENCANA KEGIATAN SUMBER DANA ALOKASI KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2022
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BALANGAN**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET OUTPUT			BIAYA	
				VOLUME	SATUAN	LOKASI		
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				Rp	1.375.616.842
			a. Pengadaan dan pemasangan Rambu Rambu Lintas	198	Set	Jalan Lingkar Timur (Kab.Balangan)	Rp	225.190.440
			b. Pengadaan dan pemasangan Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ)	12	Set	Jalan A. Yani (Kab.Balangan)	Rp	162.639.232
			c. Pengadaan dan pemasangan Lampu Peringatan (Warning Light)	14	Set	Jalan A. Yani (Kab.Balangan)	Rp	604.078.502
			d. Alat Penerangan Jalan (APJ) Tenaga Surya	10	Set	Jalan Lingkar Timur (Kab.Balangan)	Rp	383.708.669

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Balangan tahun 2022 terfokus pada 6 prioritas diantaranya : 1) Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur perdesaan dan perkotaan Paringin 2) Peningkatan vaksinasi dan penanganan covid-19 3) Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian, perkebunan, dan pariwisata serta ekonomi kreatif 4) Meningkatkan kualitas Pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan 5) Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara 6) Mewujudkan kehidupan social, budaya, dan agama pemerintahan yang harmonis dan kondusif. Tujuan dan sasaran prioritas pembangunan Kabupaten Balangan tahun 2022 terkait dengan tugas fungsi Dinas Perhubungan adalah Operasionalisasi Angkutan Umum Perintis Trayek Paringin – Juai – Halon dan Paringin – Awayan – Tebing Tinggi.

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan Tahun 2022 merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, sistem perencanaan pembangunan provinsi serta sistem perencanaan pembangunan Kabupaten Balangan. Oleh karena itu, Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Perhubungan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan, sehingga dapat dikatakan bahwa Rencana Kerja Dinas Perhubungan bersinergi dengan dokumen perencanaan lain, baik Nasional, seperti RPJP Nasional, RKP Nasional; maupun di tingkat Provinsi, seperti RPJP Provinsi Kalimantan Selatan 2005–2025, RPJM Provinsi Kalimantan Selatan 2021-2026, RKPD Provinsi Kalimantan Selatan 2022;

RPJMD Kabupaten Balangan 2021-2026 dan RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2022.

Dinas Perhubungan sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Balangan memiliki peran di dalam menyusun dan mengimplementasikan rencana pembangunan. Untuk menyusun dan mengawal implementasi rencana pembangunan, pada tahun 2022 Dinas Perhubungan merencanakan akan melaksanakan 2 (dua) program dengan jumlah kegiatan sebanyak 14 (empat belas) kegiatan dan jumlah sub kegiatan sebanyak 28 (dua puluh delapan) sub kegiatan dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 6.500.000.000,- di luar gaji dan Tunjangan ASN.

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN SINERGITAS KEBIJAKAN DAERAH.

Kebijakan Nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022, sebagai berikut:

TEMA PEMBANGUNAN :

Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural

PRIORITAS NASIONAL :

Prioritas 1 :

Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan

Prioritas 2 :

Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Prioritas 3 :

Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

Prioritas 4 :

Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Prioritas 5 :

Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Prioritas 6 :

Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

Prioritas 7 :

Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi RPJMN 2020-2024 adalah :

TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 (tujuh) misi pembangunan yaitu :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritime, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan Negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritime;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi Negara maritime yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan

Rencana Kerja Pembangunan (RKP) 2022 mengusng Tema “ Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural “. Jadi fondasi awal dari pemulihan ekonomi adalah pengendalian Covid-19.

Arah kebijakan pengembangan konektivitas pada tahun 2022 akan dititikberatkan pada pengembangan konektivitas darat, laut, udara dan keselamatan jalan.

Pengembangan konektivitas laut, akan difokuskan pada Pengembangan Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu di wilayah timur, yakni Pelabuhan Patimban Tahap I Fase 2, Pembangunan Pelabuhan Baru di Ambon dan Kupang terpadu perikanan. Upaya ini diharapkan dapat menurunkan tingginya biaya logistik di wilayah timur Indonesia.

Sementara itu, konektivitas di darat akan difokuskan pada Pengembangan Angkutan Massal di 6 kota metropolitan, yakni: Pembangunan MRT Tahap II di Jakarta, BRT di Bandung dan Medan serta Kereta Api Komuter di Surabaya.

Selanjutnya, konektivitas udara akan dititikberatkan pada penataan bandara pintu masuk wisatawan mancanegara melalui bandara di Medan, Soekarno Hatta, New Yogyakarta, Balikpapan, Surabaya, Bali, Manado dan Makassar. Serta Pembangunan Bandara baru untuk mendukung Jembatan Udara, yaitu Bandara Nabire Baru dan Bandara Sobaham.

Selain pembangunan angkutan massal, pembangunan konektivitas darat akan difokuskan pula pada pengembangan konektivitas kereta api, yaitu Pembangunan Kereta Api berkecepatan tinggi di pulau Jawa, yakni: KA cepat Jakarta-Bandung dan KA semi cepat Jakarta-Semarang. Kedua, yaitu Pembangunan Kereta Api Makassar- Pare pare, yang akan menghubungkan kawasan industri dan Pelabuhan Garongkong serta Makassar New Port. Pembangunan ini diharapkan dapat meningkatkan mobilitas antar kota dan mendukung logistik.

Selain menetapkan arah kebijakan konektivitas di darat, laut dan udara pada tahun 2022, pemerintah menekankan pentingnya keselamatan jalan, dengan Program Penyiapan Balai Pengujian Kendaraan berstandar global.

Kebijakan Umum Kementerian Perhubungan dalam pembangunan dan penyelenggaraan transportasi meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Mendukung pergerakan kelancaran mobilitas penumpang dan distribusi barang/ jasa untuk mendorong pengembangan konektivitas antar wilayah dan meningkatkan daya saing produk nasional;
2. Mewujudkan ketahanan nasional dan wawasan nusantara guna memantapkan penalaran keutuhan NKRI;
3. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi guna memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa transportasi;

4. Memberikan ruang seluas-luasnya kepada daerah berdasarkan kewenangannya dan memberikan kemudahan kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan angkutan massal;
5. Mendorong partisipasi peran serta swasta dengan memperhitungkan tingkat pelayanan agar tetap terjaga efisiensi, pemerataan kepentingan daya beli masyarakat lainnya serta kepentingan operator terkait dengan jaminan kelangsungan usaha;
6. Meningkatkan kualitas SDM Transportasi guna mewujudkan penyelenggaraan transportasi yang handal, efisien dan efektif;
7. Mendorong pengembangan teknologi transportasi yang ramah lingkungan sebagai antisipasi terhadap dampak perubahan iklim.

Sedangkan arah kebijakan umum Nasional bidang transportasi darat adalah sebagai berikut :

1. Arah Kebijakan Pembangunan Transportasi Jalan

- a. Meningkatkan kondisi pelayanan prasarana jalan melalui penanganan muatan lebih secara komprehensif, dan melibatkan berbagai instansi terkait.
- b. Meningkatkan keselamatan lalu lintas jalan secara komprehensif dan terpadu dari berbagai aspek (pencegahan, pembinaan dan penegakan hukum, penanganan dampak kecelakaan dan daerah rawan kecelakaan, sistem informasi kecelakaan lalu lintas dan kelaikan sarana, serta ijin pengemudi di jalan).
- c. Meningkatkan kelancaran pelayanan angkutan jalan secara terpadu:
 - 1) penataan sistem jaringan dan terminal;
 - 2) manajemen lalu lintas;
 - 3) pemasangan fasilitas dan rambu jalan;
 - 4) penegakan hukum dan disiplin di jalan;
 - 5) mendorong efisiensi transportasi barang dan penumpang di jalan melalui deregulasi pungutan dan retribusi di jalan, penataan jaringan dan ijin trayek;
 - 6) kerjasama antar lembaga pemerintah (pusat dan daerah).
- d. Meningkatkan aksesibilitas pelayanan kepada masyarakat diantaranya melalui penyediaan pelayanan angkutan perintis pada daerah terpencil.
- e. Meningkatkan kinerja peraturan dan kelembagaan melalui:
 - 1) Penataan sistem transportasi jalan sejalan dengan sistem transportasi nasional dan wilayah (lokal); diantaranya melalui penyusunan RUJTJ (Rancangan Umum

Jaringan Transportasi Jalan) meliputi penataan simpul, ruang kegiatan, ruang lalu lintas serta penataan pola distribusi nasional sesuai dengan rencana kelas jalan;

- 2) Menyukseskan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 3) Peningkatan pembinaan teknis transportasi di daerah, sejalan dengan desentralisasi dan otonomi daerah, dibuat sistem standar pelayanan minimal dan standar teknis di bidang LLAJ serta skema untuk peningkatan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan LLAJ di daerah;
- 4) Meningkatkan peran serta, investasi swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan transportasi jalan dengan menciptakan iklim kompetisi yang sehat dan transparan dalam penyelenggaraan transportasi, serta pembinaan terhadap operator dan pengusaha di bidang LLAJ;
- f. Meningkatkan profesionalisme SDM (petugas, disiplin operator dan pengguna di jalan), meningkatkan kemampuan manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pembinaan teknis tentang pelayanan operasional transportasi.
- g. Mendukung pengembangan transportasi yang berkelanjutan, terutama penggunaan transportasi umum massal di perkotaan yang padat dan yang terjangkau dan efisien, berbasis masyarakat dan terpadu dengan pengembangan wilayahnya.

2. Arah Kebijakan Pembangunan Keselamatan Transportasi Darat

- a. Penyusunan peraturan pelaksanaan Undang-Undang No.22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- b. Pembentukan Dewan Keselamatan Transportasi Jalan (DKTJ) pusat dan daerah;
- c. Revisi dan penetapan Cetak Biru Keselamatan jalan;
- d. Penggalan sumber-sumber pendanaan untuk mendukung keselamatan transportasi darat;
- e. Pembangunan Sistem Informasi Keselamatan (SIK);
- f. Promosi dan Kemitraan (pendidikan dan pelatihan, penghargaan dan sanksi) terhadap penyelenggaraan keselamatan transportasi darat.

3. Arah Kebijakan Pembangunan Transportasi Perkotaan

- a. Menciptakan sistem transportasi perkotaan yang terintegrasi dengan tata ruang;
- b. Mewujudkan penyelenggaraan angkutan perkotaan yang efisien dengan berbasis masyarakat dan wilayah, andal dan ramah lingkungan serta terjangkau bagi masyarakat.

- c. Peningkatan peran angkutan umum perkotaan:
- d. Peningkatan kelancaran dan kenyamanan lalu lintas perkotaan:
- e. Peningkatan transportasi perkotaan berkelanjutan yang ramah lingkungan:

Sasaran pembangunan transportasi diwujudkan dalam sasaran sub sektor perhubungan pada Transportasi Darat sebagai berikut:

1. Sasaran Pembangunan Bidang Transportasi Jalan

- a. Meningkatnya kondisi prasarana LLAJ terutama menurunnya jumlah pelanggaran lalu lintas dan muatan lebih di jalan sehingga dapat menurunkan kerugian ekonomi yang diakibatkannya.
- b. Peningkatan kelaikan dan jumlah sarana LLAJ.
- c. Menurunnya tingkat kecelakaan dan fatalitas kecelakaan lalu lintas di jalan serta meningkatnya kualitas pelayanan angkutan dalam hal ketertiban, keamanan dan kenyamanan transportasi jalan, terutama angkutan umum di perkotaan, pedesaan dan antarkota.
- d. Meningkatnya keterpaduan antarmoda dan efisiensi dalam mendukung mobilitas manusia, barang dan jasa, mendukung perwujudan sistem transportasi nasional dan wilayah (lokal), serta terciptanya pola distribusi nasional.
- e. Meningkatnya keterjangkauan pelayanan transportasi umum bagi masyarakat luas di perkotaan dan pedesaan serta dukungan pelayanan transportasi jalan perintis di wilayah terpencil untuk mendukung pengembangan wilayah
- f. Meningkatnya efektivitas regulasi dan kelembagaan transportasi jalan, melalui:
 - 1) Desentralisasi dan otonomi daerah, peningkatan koordinasi dan kerjasama antarlembaga dan antarpemerintah pusat dan daerah dalam pembinaan transportasi jalan, terutama untuk angkutan perkotaan, pedesaan dan antarkota dalam provinsi;
 - 2) Meningkatnya peran serta swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan transportasi jalan (angkutan perkotaan, pedesaan, dan antarkota);
 - 3) Memperjelas peran regulator, pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta BUMN dan BUMD dalam pelayanan transportasi publik.
 - (4). Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas yang baik, dan penanganan dampak polusi udara serta pengembangan teknologi sarana yang ramah lingkungan, terutama di wilayah perkotaan.
 - (5). Meningkatnya SDM profesional dalam perencanaan pembinaan dan penyelenggaraan LLAJ.

2. Sasaran Pembangunan Bidang Keselamatan Transportasi Darat

- a. Terwujudnya prioritas kebijakan keselamatan jalan;
- b. Terwujudnya keselamatan bagi pengguna jalan dan pengguna ASDP;
- c. Terwujudnya penyediaan fasilitas jalan yang aman guna mengurangi tingkat fatalitas kecelakaan;
- d. Terwujudnya penyediaan kendaraan yang lebih aman;
- e. Meningkatkan pelaksanaan sistem keselamatan dan manajemen keselamatan termasuk pelaksanaan mekanisme pengawasan;
- f. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan guna mengurangi tingkat kecelakaan transportasi darat.

3. Bidang Transportasi Perkotaan

- a. Mewujudkan tata cara dan konsep pembinaan transportasi perkotaan agar dapat dipahami seluruh pengguna jasa transportasi;
- b. Meningkatnya partisipasi dan peranserta institusi terkait dalam penyelenggaraan transportasi perkotaan;
- c. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan perkotaan;
- d. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan transportasi perkotaan berbasis angkutan massal;
- e. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam peningkatan tertib lalu lintas;
- f. Meningkatnya tertib lalu lintas dan keselamatan angkutan perkotaan;
- g. Meningkatnya inovasi pengembangan dan teknologi transportasi perkotaan yang ramah lingkungan.

Memperhatikan arah kebijakan Nasional dan Provinsi Tahun 2022, Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan Tahun 2022 mendukung meski secara tidak langsung dengan prioritas Prioritas Pembangunan Nasional maupun Provinsi, namun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan yaitu melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), maka dukungan Dinas Perhubungan dalam pencapaian arah kebijakan Nasional dan Provinsi tahun 2022 adalah melakukan sinkronisasi, sinergitas, dan harmonisasi perencanaan pembangunan Pusat dan Daerah yang dituangkan dokumen Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan

penjabaran dari RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah yang memuat rancangan kerangka ekonomi, rencana kerja dan pendanaan, baik dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

A. STANDAR PELAYANAN MINIMAL(SPM)

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan **Standar Pelayanan Minimal**.

Dalam Peraturan ini disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas : pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan sosial (psl 12).

Maka dalam implementasinya di Daerah karena **Usuran Perhubungan** masuk dalam **Usuran Wajib Non Pelayanan Dasar**, sehingga Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan tidak diwajibkan menyusun laporan SPM sebagai bentuk pertanggungjawaban daerah dalam melaksanakan SPM sesuai dengan kebutuhan pelayanan dasar yang harus diberikan kepada masyarakat.

B. ARAH KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN BIDANG PERHUBUNGAN

Kebijakan Pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Selatan **pada bidang perhubungan** termasuk pada misi keempat yaitu “**Mengembangkan Infrastruktur Wilayah yang Mendukung Percepatan Pengembangan Ekonomi dan Sosial Budaya**”, dilaksanakan melalui prioritas Pembangunan dan Perbaikan Infrastruktur dengan tujuan Mewujudkan ketersediaan infrastruktur daerah yang merata, dan

berkualitas, serta mampu mendukung pengembangan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya:

Arah Kebijakan Pembangunan dan Perbaikan Infrastruktur berkaitan dengan perhubungan :

- a. Mengembangkan sarana transportasi yang terintegrasi dan berkelanjutan ; dengan kebijakan Membangun dan mengembangkan infrastruktur transportasi
- b. Mengembangkan infrastruktur transportasi dalam rangka peningkatan pelayanan pergerakan orang, barang dan jasa dengan kebijakan ;
 - 1) Penyediaan fasilitas keselamatan transportasi
 - 2) Peningkatan sistem transportasi antar moda

Untuk prioritas daerah dengan memperkuat sarana prasarana dasar dan perekonomian.

Program Prioritas Pembangunan bidang perhubungan akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ).
- 2) Program Pengelolaan Pelayaran
- 3) Program Pengelolaan Perkeretaapian

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Balangan, fokus prioritas yang menjadi tema utama RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2022 adalah “ **Peningkatan kualitas layanan masyarakat melalui pengembangan infrastruktur desa dan penataan Kota Paringin serta peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat terhadap dampak pandemi covid-19** “. Hal hal mendasar yang menjadi kebijakan dalam perencanaan pembangunan tahun 2022 mendatang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur perdesaan dan perkotaan
2. Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian, perkebunan, dan pariwisata, serta ekonomi kreatif
3. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat
4. Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara
5. Mewujudkan kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif

Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan sesuai dengan Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan sehingga program kegiatan di Dinas Perhubungan mendukung Misi ke -1 (*Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur perdesaan dan perkotaan*)

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

a. Tujuan

Tujuan Strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai 5 tahun ke depan. Dengan diformulasikan tujuan strategik ini maka Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan dapat dengan tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi tuntutan visinya. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Dengan adanya penetapan tujuan akan dapat diletakkan kerangka prioritas untuk menentukan arah, guna pencapaian keberhasilan sebagai motivator dan pendorong bagi kinerja yang memuaskan dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Adapun yang menjadi tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan adalah

NO	TUJUAN
1	Meningkatnya Kuantitas, Kualitas Pelayanan dan Keselamatan Transportasi

b. Sasaran

Sasaran merupakan target yang ingin dicapai di masa yang akan datang dengan suatu tujuan yang jelas yang dilandasi dengan visi dan misi yang jelas.

Adapun yang menjadi sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan adalah sebagai berikut :

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran
1	Meningkatnya Kuantitas, Kualitas Pelayanan dan Keselamatan Transportasi	Meningkatkan pelayanan Bidang Transportasi Darat yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik Sektor Transportasi Darat	83
			Persentase peningkatan kapasitas sarana prasarana transportasi darat	39,48%

Tabel. 3.2
Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada tahun 2021-2026					
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Kuantitas, Kualitas Pelayanan dan Keselamatan Transportasi	Meningkatkan pelayanan Bidang Transportasi Darat yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik Sektor Transportasi Darat	82,98	83	83,15	83,25	83,40	83,75
			Persentase peningkatan kapasitas sarana prasarana transportasi darat	22.91%	39.48%	57.95%	85.97%	91.18%	100%

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program adalah himpunan dari beberapa kegiatan yang nyata, terpadu dan sistematis yang akan dilaksanakan oleh elemen-elemen yang terdapat dan menjadi bagian dari suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam penyusunan program tersebut, ada beberapa kriteria yang ditetapkan antara lain:

1. Memperhatikan tugas pokok dari masing-masing bidang
2. Memperhatikan program Pemerintah Kabupaten Balangan
3. Mempertimbangkan hasil evaluasi program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya, saat ini dan akan datang
4. Memperhatikan skala prioritas dalam mendukung pencapaian visi misi Kepala Daerah serta pencapaian IKU Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan.

Sedangkan kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk Tahun 2022 Rencana Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan Tahun 2022 mencakup 2 Program terdiri dari 13 kegiatan dan 29 Sub Kegiatan dengan Rencana anggaran yang akan digunakan untuk melaksanakan program kegiatan tersebut adalah sebesar Rp. 6.500.000.000,00 (Enam miliar lima ratus juta rupiah) yang berasal dari APBD.

Secara rinci Rencana program dan kegiatan tersebut adalah :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** dengan kegiatan meliputi :
 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
 - a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)** dengan kegiatan meliputi :
7. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan kabupaten/kota
Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
 - b. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

8. Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
Sub Kegiatan :
 - a. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C
9. Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
Sub Kegiatan :
 - a. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik
10. Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - b. Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - c. Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor
 - d. Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - e. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
11. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan kabupaten/Kota
Sub Kegiatan :
 - a. Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
 - b. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota
12. Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
Sub Kegiatan :
 - a. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota
13. Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Tabel 3.3

PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS
PENDUKUNG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022

Sasaran	Indikator	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatkan pelayanan Bidang Transportasi Darat yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik Sektor Transportasi Darat	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan	82%	108.114.500
		Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan	82%	108.114.500
		Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan yang laik jalan	1.494 kendaraan	108.114.500
	Persentase peningkatan kapasitas sarana prasarana transportasi darat	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan	82%	5.500.830.100
			Persentase sarana prasarana perlengkapan jalan yang terpasang	39.48%	
			Persentase desa terlayani angkutan umum	66.7%	
		Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan kabupaten/kota	Persentase perlengkapan jalan yang terpasang	20%	4.316.715.100
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Perlengkapan Jalan Yang terpasang	39.48%	33.000.000
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Persentase Perlengkapan Jalan Yang terpelihara	100%	4.283.715.100		

Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah PAD dari retribusi pelayanan terminal	6.000.000	74.230.000
Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah SDM yang mengikuti Diklat Pengelola Terminala Tipe C	1 Orang	74.230.000
Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah titik parkir yang dikelola	168 Titik/Bulan	112.230.000
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah titik parkir yang dikelola	168 Titik/Tahun	112.230.000
Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan	82%	424.250.000
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah penyediaan sarana dan Prasarana Pengujian Berkala kendaraan bermotor	1 unit (sideslip tester)	253.350.000
Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat	2 orang	20.000.000
Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Bukti Lulus Uji	1.500 set	37.500.000
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Alat Uji yang terpelihara	10 buah	113.400.000
Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan kabupaten/Kota	Jumlah Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang diselenggarakan	3 Buah	512.405.000
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengawasan & Pengendalian Keselamatan Lalu lintas yang dilaksanakan	200 Kegiatan	502.405.000

	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil rapat forum lalu lintas dan angkutan jalan	1 Laporan	10.000.000
	Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Laporan hasil audit berupa rekomendasi & Jumlah Laporan hasil Inspeksi berupa laporan keadaan & Kinerja obyek yang diinspeksi dalam rangka peningkatan keselamatan lalu lintas angkutan jalan	62	6.375.000
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil Inspeksi, Audit & Pemantauan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten / Kota yang memenuhi Persyaratan	1 laporan	6.375.000
	Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan angkutan umum	2 Unit	54.625.000
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan angkutan umum	2 Unit	54.625.000
JUMLAH TOTAL				5.608.944.600

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Dishub Tahun 2021

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan tahun 2022 sebagai acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berisi program kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif. Bagi Dinas Perhubungan, Renja Tahun 2022 yang ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan dalam kerangka anggaran dalam APBD Tahun 2022 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran. Rencana kerja dan pendanaan Dinas Perhubungan Tahun 2022 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026, serta mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022

Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program kegiatan yang ditetapkan dalam Renja Tahun 2022, Prioritas Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2022 benar-benar yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas. Pelaksanaan kegiatan Renja Tahun 2022 harus dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar bidang, satuan kerja dengan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun mengakomodir usulan masyarakat melalui Musrenbang Kecamatan sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip *safe guarding* yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi.

Alokasi anggaran untuk program dan kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel T-C.33.
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Kabupaten Balangan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2									
2	15								
2	15	01							
2	15	01	2	01					
2	15	01	2	01	01				
2	15	01	2	01	06				

2	15	01	2	02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku	Sekretariat	100%	3.124.365.370	APBD		100%	3.782.000.000
2	15	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentasi ASN yang membayar gaji dan tunjangan sesuai ketentuan perundang-undangan	Sekretariat	100%	3.067.479.370	APBD		100%	3.650.000.000
2	15	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentasi dokumen keuangan yang diverifikasi	Sekretariat	100%	56.886.000	APBD		100%	132.000.000
2	15	01	2	05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sekretariat	100%	138.846.000	APBD		100%	250.000.000
2	15	01	2	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Sekretariat	23 Orang	138.846.000	APBD		25 Orang	250.000.000
2	15	01	2	06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	Sekretariat	100%	313.654.500	APBD		100%	734.100.000
2	15	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Sekretariat	93 Buah	4.645.100	APBD		300 Buah	20.000.000
2	15	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sekretariat	32 Buah	34.000.000	APBD		100 Buah	100.000.000
2	15	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Sekretariat	69.141 Lembar	20.742.400	APBD		175.000 Lembar	50.000.000
2	15	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Sekretariat	112 Eksm/Bulan	4.800.000	APBD		120 Eksm/Bulan	12.000.000
2	15	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan Jumlah makan dan minum yang disediakan untuk mendukung kegiatan rapat	Sekretariat	127 Kali 645 Porsi	249.467.000	APBD		125 Kali 2000 Porsi	552.100.000
2	15	01	2	08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sekretariat	12 Bulan	150.991.900	APBD		12 Bulan	287.800.000
2	15	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar yang dikelola	Sekretariat	900 Surat	5.550.000	APBD		900 Surat	47.300.000

2	15	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentasi terbayarnya tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sekretariat	100%	73.400.000	APBD		100%	125.000.000
2	15	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sekretariat	12 Bulan	72.041.900	APBD		12 Bulan	115.500.000
2	15	01	2	09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sekretariat	12 Bulan	242.917.000	APBD		12 Bulan	301.938.900
2	15	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Kendaraan Dinas Operasional Layak Fungsi	Sekretariat	100%	195.397.000	APBD		100%	214.938.900
2	15	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Gedung kantor layak fungsi	Sekretariat	100%	47.520.000	APBD		100%	87.000.000
2	15	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan	Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	82%	6.888.774.600	APBD		86%	7.230.933.000
					Persentase Prasarana Perlengkapan Jalan		Kab. Balangan	39,48%				57,45%		
					Presentase Sarana Prasarana terminal yang memadai		Kab. Balangan	26.67%				36.67%		
					Presentase Sarana Prasarana Perparkiran yang memadai		Kab. Balangan	55.56%				66.67%		
					Presentase Desa terlayani angkutan yang menjadi lintasan trayek		Kab. Balangan	66.7%				100%		
					Indeks Tingkat Pelayanan Jalan (VCR)		Kab. Balangan	0.32				0.35		
2	15	02	2	02		Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan kabupaten/kota	Persentase perlengkapan jalan yang terpasang	Kab. Balangan	39.48%	5.343.775.100	APBD		57.95%	5.100.000.000
2	15	02	2	02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Perlengkapan Jalan Yang terpasang	Kab. Balangan	39.48%	1.033.000.000	APBD		57.95%	600.000.000
2	15	02	2	02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Persentase Perlengkapan Jalan Yang terpelihara	Kab. Balangan	100%	4.310.775.100	APBD		100%	4.500.000.000

2	15	02	2	03		Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah PAD dari retribusi pelayanan terminal	Kab. Balangan	6.000.000	94.690.000	APBD		7.000.000	105.000.000
2	15	02	2	03	05	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah SDM yang mengikuti Diklat Pengelola Terminal Tipe C	Dinas Perhubungan	1 Orang	94.690.000	APBD		2 Orang	105.000.000
2	15	02	2	04		Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Presentase Pelayanan Perparkiran	Kab. Balangan	49.63%	145.890.000	APBD		62.22%	325.000.000
2	15	02	2	04	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Izin Penyelenggaraan Parkir Yang Dikeluarkan	Kab. Balangan	10 Izin	145.890.000	APBD		11 Izin	325.000.000
					Jumlah Fasilitas Parkir yang terbangun		Kab. Balangan	0 Buah	1 Buah					
2	15	02	2	05		Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan	Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	82%	559.549.500	APBD		86%	453.833.000
2	15	02	2	05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah penyediaan sarana dan Prasarana Pengujian Berkala kendaraan bermotor	Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	1 unit (sideslip tester)	253.350.000	APBD		1 unit (smoke tester)	150.000.000
2	15	02	2	05	02	Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat	Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	2 orang	20.000.000	APBD		2 orang	20.000.000
2	15	02	2	05	03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan yang laik jalan	Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	1.494 kendaraan	135.299.500	APBD		1.568 kendaraan	118.833.000
2	15	02	2	05	04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Bukti Lulus Uji	Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	1.500 set	37.500.000	APBD		2.000 set	50.000.000
2	15	02	2	05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Alat Uji yang terpelihara	Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	10 Unit	113.400.000	APBD		10 Unit	115.000.000
2	15	02	2	06		Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan kabupaten/Kota	Jumlah Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang diselenggarakan	Kab. Balangan	2 Buah	683.945.000	APBD		3 Buah	665.000.000

2	15	02	2	06	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengawasan & Pengendalian Keselamatan Lalu lintas yang dilaksanakan	Kab. Balangan	200 Kegiatan	640.345.000	APBD		200 Kegiatan	650.000.000
2	15	02	2	06	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil rapat forum lalu lintas dan angkutan jalan	Kab. Balangan	4 Laporan	43.600.000	APBD		3 Laporan	15.000.000
2	15	02	2	08		Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Laporan hasil audit berupa rekomendasi & Jumlah Laporan hasil Inpeksi berupa laporan keadaan & Kinerja obyek yang diinspeksi dalam rangka peningkatan keselamatan lalu lintas angkutan jalan	Kab. Balangan	30	6.300.000	APBD		62	125.000.000
2	15	02	2	08	04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil Inspeksi, Audit & Pemantauan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten / Kota yang memenuhi Persyaratan	Kab. Balangan	1 laporan	6.300.000	APBD		5 Laporan	125.000.000
2	15	02	2	09		Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan angkutan umum	Kab. Balangan	1 Unit	54.625.000	APBD		3 Unit	457.100.000
2	15	02	2	09	01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan angkutan umum	Kab. Balangan	1 Unit	54.625.000	APBD		3 Unit	457.100.000
JUMLAH TOTAL										10.949.429.370				12.735.986.900

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja – SKPD) Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan Tahun 2022 adalah panduan dalam menjalankan tugas, pokok, fungsi Dinas Perhubungan untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Balangan. Dan merupakan manivestasi dari respon Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan terhadap kondisi lingkungannya baik eksternal maupun internal yang senantiasa berubah begitu cepat dan memerlukan pengamatan yang akurat serta diagnose lingkungan yang efektif.

Rencana Kerja ini menjadi acuan kerja dari semua bidang-bidang sesuai dengan tugas, pokok, fungsi masing-masing, diharapkan mampu memberikan kontribusi positif dan dapat memperkecil atau menghilangkan dampak negative dalam operasional organisasi.

Renja ini akan terlaksana apabila mendapat perhatian semua pihak dan tersedianya anggaran. Adanya Renja ini diharapkan agar Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan serta seluruh aparat dapat melaksanakan tugas secara terarah, terukur dan berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat, akurat, transparan , adil dan akuntabel.

Paringin, Juni 2021
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Balangan



RUDIANSYAH SOFYAN, S.Hut, ME

Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19690324 199703 1 001

Tabel T-C.33.
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Kabupaten Balangan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
2	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							
2	15	01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	Sekretariat	68.20%	4,209,491,070	APBD	68.50%	5,505,053,900
			Persentase Pencatatan Aset Dalam Kondisi Baik		100%			100%	
2	15	01 2 01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentasi dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang baik	Sekretariat	100%	89,879,850	APBD	100%	149,215,000
2	15	01 2 01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sekretariat	2 Dok	87,179,850	APBD	2 Dok	144,615,000
2	15	01 2 01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sekretariat	2 Dok	2,700,000	APBD	2 Dok	4,600,000
2	15	01 2 02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku	Sekretariat	100%	3,273,201,270	APBD	100%	3,782,000,000
2	15	01 2 02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sekretariat	100%	3,216,315,320	APBD	100%	3,650,000,000
2	15	01 2 02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sekretariat	100%	56,885,950	APBD	100%	132,000,000
2	15	01 2 05 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sekretariat	100%	138,846,000	APBD	100%	250,000,000
2	15	01 2 05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Sekretariat	23 Orang	138,846,000	APBD	25 Orang	250,000,000
2	15	01 2 06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	Sekretariat	100%	313,655,050	APBD	100%	734,100,000
2	15	01 2 06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sekretariat	93 Buah	4,645,100	APBD	300 Buah	20,000,000
2	15	01 2 06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sekretariat	32 Buah	34,000,000	APBD	100 Buah	100,000,000
2	15	01 2 06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sekretariat	69.141 Lembar	20,742,300	APBD	175.000 Lembar	50,000,000
2	15	01 2 06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Sekretariat	112 Eksm/Bulan	4,800,000	APBD	120 Eksm/Bulan	12,000,000

2	15	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan Jumlah makan dan minum yang disediakan untuk mendukung kegiatan rapat	Sekretariat	126 Kali 594 Porsi	249,467,650	APBD	125 Kali 2000 Porsi	552,100,000
2	15	01	2	08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sekretariat	12 Bulan	150,991,900	APBD	12 Bulan	287,800,000
2	15	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar yang dikelola	Sekretariat	900 Surat	5,550,000	APBD	900 Surat	47,300,000
2	15	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terbayarnya tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sekretariat	100%	73,400,000	APBD	100%	125,000,000
2	15	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sekretariat	12 Bulan	72,041,900	APBD	12 Bulan	115,500,000
2	15	01	2	09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sekretariat	12 Bulan	242,917,000	APBD	12 Bulan	301,938,900
2	15	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Kendaraan Dinas Operasional Layak Fungsi	Sekretariat	100%	195,397,000	APBD	100%	214,938,900
2	15	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Gedung kantor layak fungsi	Sekretariat	100%	47,520,000	APBD	100%	87,000,000
2	15	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan	Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	82%	6,381,494,050	APBD	86%	7,261,713,000
						Persentase Prasarana Perlengkapan Jalan	Kab. Balangan	39.48%	57.45%				
						Presentase Sarana Prasarana terminal yang memadai	Kab. Balangan	26.67%	36.67%				
						Presentase Sarana Prasarana Perparkiran yang memadai	Kab. Balangan	55.56%	66.67%				
						Presentase Desa terlayani angkutan yang menjadi lintasan trayek	Kab. Balangan	66.7%	100%				
						Indeks Tingkat Pelayanan Jalan (VCR)	Kab. Balangan	0.32	0.35				
2	15	02	2	02		Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan kabupaten/kota	Persentase perlengkapan jalan yang terpasang	Kab. Balangan	39.48%	4,543,775,100	APBD	57.95%	5,100,000,000
2	15	02	2	02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Perlengkapan Jalan Yang terpasang	Kab. Balangan	39.48%	233,000,000	APBD	57.95%	600,000,000
2	15	02	2	02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Persentase Perlengkapan Jalan Yang terpelihara	Kab. Balangan	100%	4,310,775,100	APBD	100%	4,500,000,000
2	15	02	2	03		Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah PAD dari retribusi pelayanan terminal	Kab. Balangan	6,000,000	94,690,000	APBD	7,000,000	105,000,000
2	15	02	2	03	05	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah SDM yang mengikuti Diklat Pengelola Terminala Tipe C	Dinas Perhubungan	1 Orang	94,690,000	APBD	2 Orang	105,000,000
2	15	02	2	04		Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Presentase Pelayanan Perparkiran	Kab. Balangan	49.63%	145,890,000	APBD	62.22%	325,000,000
2	15	02	2	04	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Izin Penyelenggaraan Parkir Yang Dikeluarkan	Kab. Balangan	10 Izin	145,890,000	APBD	11 Izin	325,000,000
							Jumlah Fasilitas Parkir yang terbangun	Kab. Balangan	0 Buah			1 Buah	

2	15	02	2	05		Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan	Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	82%	559,549,450	APBD		86%	453,833,000
2	15	02	2	05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah penyediaan sarana dan Prasarana Pengujian Berkala kendaraan bermotor	Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	1 unit (sideslip tester)	253,350,000	APBD		1 unit (smoke tester)	150,000,000
2	15	02	2	05	02	Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat	Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	2 orang	20,000,000	APBD		2 orang	20,000,000
2	15	02	2	05	03	Registasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan yang laik jalan	Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	1.494 kendaraan	135,299,450	APBD		1.568 kendaraan	118,833,000
2	15	02	2	05	04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Bukti Lulus Uji	Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	1.500 set	37,500,000	APBD		2.000 set	50,000,000
2	15	02	2	05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Alat Uji yang terpelihara	Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	10 Unit	113,400,000	APBD		10 Unit	115,000,000
2	15	02	2	06		Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan kabupaten/Kota	Jumlah Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang diselenggarakan	Kab. Balangan	2 Buah	683,944,600	APBD		3 Buah	695,780,000
2	15	02	2	06	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengawasan & Pengendalian Keselamatan Lalu lintas yang dilaksanakan	Kab. Balangan	200 Kegiatan	640,344,850	APBD		200 Kegiatan	650,000,000
2	15	02	2	06	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil rapat forum lalu lintas dan angkutan jalan	Kab. Balangan	4 Laporan	43,599,750	APBD		3 Laporan	45,780,000
2	15	02	2	08		Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Laporan hasil audit berupa rekomendasi & Jumlah Laporan hasil Inpeksi berupa laporan keadaan & Kinerja obyek yang diinspeksi dalam rangka peningkatan keselamatan lalu lintas anekutan jalan	Kab. Balangan	30	6,299,900	APBD		62	125,000,000
2	15	02	2	08	04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil Inspeksi, Audit & Pemantauan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten / Kota yang memenuhi Persyaratan	Kab. Balangan	1 laporan	6,299,900	APBD		5 Laporan	125,000,000
2	15	02	2	09		Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan angkutan umum	Kab. Balangan	14 Unit	347,345,000	APBD		3 Unit	457,100,000
2	15	02	2	09	01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan angkutan umum	Kab. Balangan	14 Unit	347,345,000	APBD		3 Unit	457,100,000
							JUMLAH TOTAL			10,590,985,120				12,766,766,900

Jumlah Anggaran yang direncanakan tahun 2022 :
Terdiri dari :

Rp 10,590,985,120.00

Program : 2 Program
Kegiatan : 13 Kegiatan

Mengetahui
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Balangan



Sub Kegiatan

: 28 Sub Kegiatan



RUDIANSYAH SOFYAN, S.Hut. ME

Pembina Utama Muda / IVc

NIP. 19690324 199703 1 001